



ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) DALAM PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KEPADA PEMERINTAH DESA

Rafit Yusriandi^{a1*}, Nodi Marefanda^{b2},

^a Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh dan 23611

^b Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh dan 23611

¹rafityusriandi229@gmail.com, ²nodimarefanda@utu.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-03-2023

Disetujui: 27-03-2023

Dipublikasikan: 30-03-2023

Kata Kunci:

1. Kinerja karyawan
2. DPMD
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Keyword:

1. Employee Performance
2. DPMD
Village Fund Cash Direct Assistance (BLT DDS)

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dalam membantu proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada pemerintah Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan perolehan sumber data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Simeulue menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini didasari dari ke lima aspek standar yang menjadi indikator kinerja pegawai lembaga pemerintahan dapat terpenuhi seluruhnya. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Namun secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue dapat dikatakan optimal.

Abstract: This study aims to analyze the performance of employees of the community and village empowerment offices of Simeulue Regency in distributing direct cash assistance for village funds (BLT-DD). The method used in this research is descriptive qualitative with the acquisition of data sources through observation methods, interviews, and documentation. The results of the research obtained based on aspects of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability, show that the performance of the Community and Village Empowerment Office in Distributing Village Fund Cash Direct Assistance to Village Governments in Simeulue Regency shows maximum results. This is based on the five aspects of standards that are indicators of the performance of government agencies that can be fully met. Although there are still some things that need to be addressed. However, overall, the performance of the Simeulue Regency Community and Village Empowerment Office (DPMD) can be said to be optimal.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diberikan kepada masyarakat miskin, sebagaimana dalam amanat peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada penduduk miskin (Rumbekwan et al., 2021).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana Desa dan ditunjukkan bagi masyarakat yang kurang mampu atau kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia (Sasuwuk et al., 2021). BLT-

DD disalurkan setiap bulan sebagaimana dalam amat peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020. Penyaluran BLT-DD di laksanakan oleh pemerintah Desa melalui metode tunai dan non tunai, besaran BLT-DD perbulan berkisar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kepala keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juli) jumlah BLT-DD perbulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kepala keluarga, dana tersebut dialokasikan dari dana Desa di setiap Desa di Indonesia yang terdampak oleh pandemi (Dana et al., 2022).

Selama masa pandemi COVID-19, setidaknya terdapat 7 (tujuh) skema bantuan pemerintah dalam bentuk jaring pengaman sosial, yakni bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, listrik gratis, kartu pra kerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil (Wardi & Elfia, 2021). Permasalahan yang kemudian muncul dari penyaluran bantuan sosial ini adalah masalah alokasi anggaran yang berbeda di tiap kementerian, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan tersebut (Rahmansyah et al., 2020). Problematika ini yang menjadi akar permasalahan apabila tidak dicegah dan ditemukan antisipasi solusi (Aseh et al., 2021). Oleh karenanya peran lembaga pemerintah penyalur bantuan dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus kerja ekstra sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercapainya *goals* program sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses pendistribusian bantuan tersebut harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang ideal dan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan pengamatan penulis, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue belum berjalan secara maksimal. Masih banyak hambatan yang ditemui dalam rangka proses penyaluran bantuan kepada aparatur Desa. Kedisiplinan pegawai, kualitas SDM, hingga sarana prasarana seperti jaringan internet menjadi akumulasi permasalahan yang menghambat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada aparatur desa. Perlu dirincikan bahwa hambatan mengenai kedisiplinan pegawai seperti selalu menunda-nunda hal yang harus di kerjakan sehingga adanya keterlambatan dalam pengimputan data. Sedangkan dari segi kualitas SDM seperti tidak sesuai antara kualifikasi lulusan pegawai DPMD dengan bidang yang dikerjakan di kantor. Kemudian sarana prasarana yang paling menonjol adalah kurangnya jaringan internet yang memadai. Sebagai informasi awal, DPMD Kabupaten Simeulue memiliki 138 Desa yang tergabung dalam 10 kecamatan dengan total penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 9.719 jiwa (DPMD, 2019). Data ini menunjukkan bahwa kategori yang masuk dalam daftar penerima manfaat BLT cukuplah besar. Tentu besaran jumlah tersebut juga berbanding lurus dengan kinerja dinas dalam mendistribusikan bantuan BLT kepada Pemerintah Desa. Mengingat luasnya cakupan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue ini, maka sudah seharusnya adanya evaluasi program yang dijalankan guna melihat sejauh mana efektivitas dan ketercapaian program yang dijalankan tersebut.

Penelitian Mandasari et al., (2022). Mengungkapkan bahwa dalam menyalurkan bantuan, pemerintah melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Masyarakat dan tokoh-tokoh, serta BPD, kemudian melakukan pengelolaan data para KPM penerima Bantuan Sosial Covid-19, dan

menyalurkan Bantuan Sosial langsung ke rumah-rumah warga penerima Bantuan Sosial Covid-19. Kemudian penelitian dilakukan oleh Ana, (2021) mengungkapkan bahwa belum maksimalnya kinerja pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Hal ini ditandai dengan aspek akuntabilitas data yang belum valid dan akurat. Selanjutnya penelitian DITA, (2022), Evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, belum optimal yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan BPD kepada Masyarakat.

Maka dari itu penelitian ini mengisi gap pengetahuan yang berfokus pada Sejauh Mana Kinerja DPMD dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Pemerintah Desa terutama di kabupaten Simeulue.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis ambil menggunakan model penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2013). Penggunaan model penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan serta memahami secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan kinerja DPMD dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Pemerintah Desa. Sedangkan informan yang dilibatkan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Simeulue, Sekretaris Dinas PMD, Kepala Desa di Kabupaten Simeulue dan Sekretaris Desa di Kabupaten Simeulue.

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan tiga cara yakni: 1) wawancara secara mendalam kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Simeulue, Sekretaris Dinas PMD, Kepala Desa di Kabupaten Simeulue dan Sekretaris Desa di Kabupaten Simeulue terkait proses pendistribusian BLT DD. 2) Observasi dilakukan guna melihat secara langsung aktivitas alur pendistribusi BLT DD. 3) dokumentasi berupa kumpulan dokumen yang berkaitan dengan data pendistribusian BLT DD Kabupaten Simeulue (Rohman et al., 2022).

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan teknik analisis data induktif dan interaktif yang digagas oleh Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Fathoni, 2006). Sebagai langkah mempermudah penelitian, penulis menggunakan pedoman penelitian yang dikemukakan oleh Stufflebeam dalam kutipan Herdiyansyah, (2010) sebagai panduan jalannya proses penelitian.

Gambar 1 Alur desain penelitian



Sumber: (Rohman et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas terkait kinerja lembaga pemerintahan, tentu tidak terlepas dari kajian dalam manajemen birokrasi (Yunanto, 2020). Diantara model manajemen birokrasi yang terus digaungkan saat ini adalah manajemen birokrasi profesional dimana organisasi birokrasi dapat dikatakan bermanfaat dan mampu

memberikan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien adalah jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi (Azizy, 2007). Dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kinerja birokrasi dapat dengan cepat menyediakan pelayanannya sesuai harapan masyarakat. Dwiyanto, (2021) dalam bukunya menjelaskan bahwa kinerja birokrasi dapat dilihat dari 5 aspek yaitu (1) Produktivitas, (2) Kualitas Layanan, (3) Responsivitas (4) Responsibilitas, (5) Akuntabilitas, Teori kinerja birokrasi menjadi alat ukur untuk mengukur kinerja birokrasi.

Gambar 2 Indikator kinerja pegawai birokrasi



Sumber: (Dwiyanto, 2021)

BLT DD merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid-19. Penyelenggara pendistribusian BLT DD di tingkat Kabupaten Simeulue dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sedangkan yang menjadi sasaran penerima bantuan adalah warga yang rentan ekonomi sebanyak 9.719 warga yang tersebar di 138 Desa dengan pagu anggaran pada tahun 2020-2022 sebesar RP. 34.988.400.000 (DPMD, 2022).

Produktivitas

Tingkat pencapaian produktivitas di kantor DPMD Kabupaten Simeulue dalam menyalurkan dana BLT DD kepada Pemerintah Desa seluruhnya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan DPMD Kabupaten Simeulue dalam penyaluran BLT DD ini dilakukan semaksimal mungkin mulai dari verifikasi data penerima manfaat, hingga penanganan aduan dari aparat Desa seputar usulan nama penerima BLT DD diatasi dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Data ini sedikit berbeda dengan permasalahan yang penulis paparkan di latar belakang.

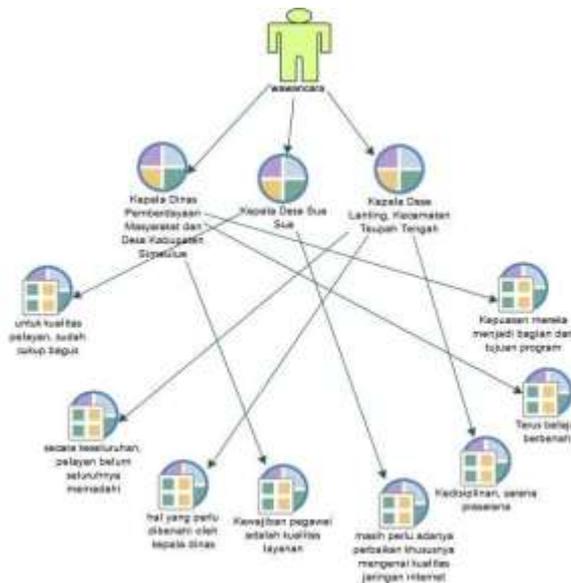
Gambar 4. Alur penerimaan bantuan BLT DD



Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan yang diberikan dapat merepresentasikan sejauh mana SDM yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Fitri, 2015). Selain itu, kualitas layanan juga dapat dilihat dari sejauh mana hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas suatu layanan (Samosir, 2019).

Gambar 5. Kualitas pelayanan



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan Nvivo 12 Plus

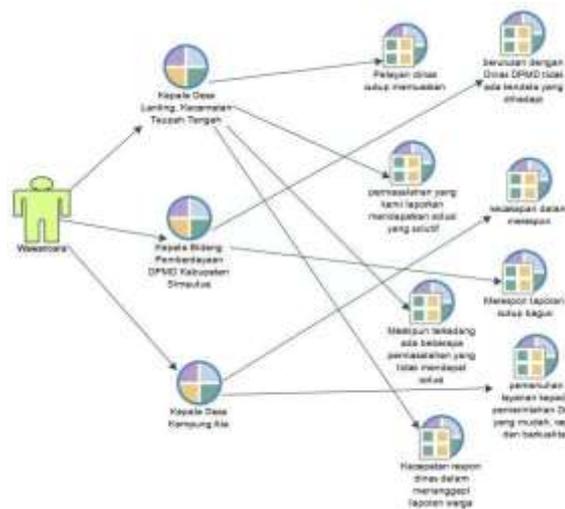
Berdasarkan Gambar 5 di atas bahwa Kualitas layanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pemerintah Desa sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur yang bertugas menangani pendistribusian BLT DD kepada Pemerintah Desa. Selain itu, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup mampu dalam mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat dalam rangka memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi. Terkait kualitas layanan Dinas DPMD Kabupaten Simeulue, penjelasan berbeda disampaikan oleh Kepala Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah. Menurutnya, kualitas layanan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh warga terkhusus kepala desa sebagai parter dalam menyalurkan BLT DD. Berikut penuturannya Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melayani

masyarakat, kualitas pelayanan tentu menjadi bagian utama yang terus diperhatikan. Oleh karena itu, seyogyanya kualitas pelayan juga menjadi bagian yang terus diawasi dan dievaluasi guna menciptakan lembaga pelayan masyarakat yang ideal. Diantara yang indikator kualitas pelayanan adalah adanya kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, kesesuaian layanan yang diberikan terhadap prosedur yang diberlakukan, serta adanya kebesaran hati dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat (Afrizal et al., 2021).

Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dewi, 2018). Responsivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam proses kegiatan penyaluran dana BLT DD kepada pemerintah Desa sudah sangat baik. Keselarasan antara visi misi dan program yang dijalankan, keselarasan program dengan kebutuhan masyarakat, dan daya tanggap pegawai terhadap kebutuhan masyarakat dapat terlihat dengan jelas pada gambar 5 di bawah.

Gambar 6. Responsivitas



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Menggunakan Nvivo 12 Plus

Berdasarkan Gambar 6 di atas bahwa selama ini pelayan dinas cukup memuaskan. Berbagai permasalahan yang kami laporkan mendapatkan solusi yang solutif. Selain itu tingkat kecakapan dalam merespon juga kami rasa cukup baik. Para pegawai cukup cepat dalam melayani kami para kepala Desa. Terkhusus lagi dalam program penyaluran bantuan BLT, kami para kepala desa cukup terbantu dengan pelayanan yang mereka berikan. Keluhan-keluhan masyarakat yang kami bawa menghadap kepada kepala dinas mendapatkan jawaban. Meskipun terkadang ada beberapa permasalahan yang tidak mendapat solusi. Misal seperti penambahan kuota penerima bantuan alhamdulillah selama berurusan dengan Dinas DPMD tidak ada kendala yang dihadapi, proses pelayan berjalan lancar, walau ada sedikit kendala dalam jaringan. Namu secara kecepatan pegawai dalam merespon laporan cukup bagus. Meski harus menunggu, tapi setidaknya permasalahan yang dilaporkan menemukan jawaban. kualitas pelayanan, kecepatan respon

dinas dalam menanggapi laporan warga masyarakat menjadi bagian utama dalam perhatian kami. Kecepatan dan ketepatan menanggapi berbagai persoalan yang datang adalah tanggung jawab setiap pegawai yang bekerja di lingkup Dinas DPMD ini. Hal ini sesuai dengan salah satu visi misi kami yaitu pemenuhan layanan kepada pemerintahan Desa yang mudah, cepat dan berkualitas.

Gambar 7. Alur Responsivitas DPMD Dalam Menanggapi Aduan



Responsibilitas

Berjalannya aktivitas organisasi publik dapat diketahui melalui reponsibilitas lembaga organisasi tersebut (Fitriana et al., 2015). selain daripada itu, kesesuaian aktivitas tersebut dengan kebijakan organisasi dan prinsip-prinsip administrasi juga menjadi bagian dari indikator responsibilitas suatu lembaga pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 sekarang ini. Responsibilitas yang diberikan dapat dinilai dari proses pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dilakkukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue sudah berjalan sesuai prosedur yang ada.

Jika merujuk pada indikator responsibilitas, maka lembaga pemerintahan dapat dikatakan responsibel apabila adanya kesesuaian kegiatan kerja dengan peraturan yang telah ditetapkan, adanya kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta adanya tanggung jawab aparatur penyelenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Gambar 8. Alur pendistribusian BLT DD Kabupaten Simeulue



Sumber: (DPMD, 2020)

Responsibilitas berhubungan dengan pelaksanaan penilaian atau evaluasi terkait standar prosedur pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar yang telah dibuat sesuai situasi dan kondisi yang ada. Responsibilitas ini dapat diketahui melalui pelaksanaan kegiatan organisasi yang telah sesuai dengan

mekanisme kerja dan prosedur kerja yang ada. Penyaluran dana langsung tunai dana desa melalui pemerintah Desa dilakukan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Data penerima bantuan sosial tunai dibuat dan diberikan langsung oleh pemerintah pusat dan selama kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai tersebut berlangsung Dinas Sosial membantu dan memantau kelancaran kegiatan tersebut dan dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditentukan bahkan lebih dari itu. Artinya tanggung jawab Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai ini sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep dasar yang dipakai untuk melihat tingkat konsistensi suatu organisasi publik dalam menyelenggarakan harapan masyarakat. Akuntabilitas dapat dilihat dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau program pemerintah kepada masyarakat. Oleh karenanya, kinerja organisasi publik juga dinilai sudut pandang eksternalnya. Suatu organisasi memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi apabila kebijakan ataupun kegiatan program yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada Pemerintah Desa sudah menunjukkan kinerja yang maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya kelengkapan data laporan penyaluran bantuan. Selain itu, kesesuaian antara kegiatan kerja dengan laporan kegiatan juga dapat terlihat dalam arsip laporan.

Tabel 1.
Laporan Rekapitulasi Penyaluran BLT Kabupaten Simeulue tahun 2020-2022

Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Jumlah Penerima Manfaat	Besaran Dana
138	10 Kecamatan	9.719 Jiwa	Rp. 34.988.400.000

Sumber: **Sumber: (DPMD, 2020)**

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, maka diambil kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Simeulue menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini didasari dari ke lima aspek standar yang menjadi indikator kinerja pegawai lembaga pemerintahan dapat terpenuhi seluruhnya. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Namun secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue dapat dikatakan optimal. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada analisis kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) kepada pemerintah desa tidak kepada penerima bantuan langsung tunai dana desa, di harapkan untuk penelitian masa depan agar

berfokus pada dampak penerimaan bantuan langsung tunai dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa,

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas Dan Akuntabilitas Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864>
- Ana, R. (2021). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Di Desa Marannu Kabupaten Maros. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.873>
- Aseh, S., Gafar, T. F., & Zamhasari, Z. (2021). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Tahun 2020. *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 2(1), 30–40.
- Azizy, A. Q. A. (2007). *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dana, B. L. T., Terhadap, D., Terdampak, W., Desa, C.-D. I., Lor, K., Dana, B. L. T., Terhadap, D., & Terdampak, W. (2022). *Covid-19 Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan* (Issue 170910201069).
- Dewi, N. L. Y. (2018). Potret Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Pada Pemerintahan Kota Denpasar. *Sintesa (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 9(1), 1–6.
- Dita, N. (2022). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (Blt) [Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram]*. <http://repository.ummat.ac.id/4492/>
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Ugm Press.
- Fathoni, A. (2006). Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Fitri, F. (2015). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(11).
- Fitriana, N., Hariani, D., & Maesaroh, M. (2015). Analisis Kinerja Organisasi Pada Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Kendal. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(2), 341–353.
- Herdiyansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. *Jakarta: Salemba Humanika*.
- Mandasari, J. A., Rahman, R., & Adiarsa, S. R. (2022). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Di Desa Karyamakmur Kabupaten Karawang. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), Article 10. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.3984-3988>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 2(1), 90–102.
- Rohman, N., Istiningsih, I., & Hasibuan, A. T. (2022). Analisis Kesiapan Mengajar Mahasiswa Prodi Pgm Melalui Program Pengayaan Keterampilan Mengajar. *Edumaspu: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 790–798.
- Rumbekwan, M., Rahmadanita, A., Ajang, O. I., Santoso, E. B., Provinsi, P., & Tengah, K. (2021). *Provinsi Kalimantan Tengah Performance Of The Bureau Of Community And Village Empowerment Service In Improving The Quality Of Village Apparatus In Lamandau Regency , Central Kalimantan Province*. 11(2), 217–230.
- Samosir, Y. D. S. A. (2019). *Analisis Kinerja Pegawai Di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Bp-Paud Dan Dikmas) Sumatera Utara [Phd Thesis]*. Universitas Medan Area.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap, Vii(108)*, 78–89.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The Use Of Experimental Design In Educational Evaluation. *Journal Of Educational Measurement*, 8(4), 267–274.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Wardi, U., & Elfia, E. (2021). Covid-19 Dan Gerakan Sosial Perempuan. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 3(1), 21–32.
- Yunanto, S. E. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Padaadministrasi. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 1–24.

